



PRO-KONTRA DAERAH KHUSUS JAKARTA GUBERNUR-WAGUB DIPILIH PRESIDEN

Berbagai perubahan akan terjadi saat Nusantara resmi menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia. Salah satunya, Jakarta tidak lagi menjadi Daerah Khusus Istimewa (DKI) tapi berubah sebagai Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Terbaru, DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) sebagai RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada Selasa (5/12/2023). Pro-kontra pun langsung mencuat karena salah satu poinnya adalah Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) DKJ ditunjuk oleh presiden, bukan melalui Pilkada seperti yang sekarang terjadi. Bila disahkan, hal tersebut bisa menjadi bukti kemunduran demokrasi. Bak mundur ke masa orde baru. Kala itu, era Soeharto mengontrol penuh kepala daerah di seluruh tingkatan, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Kepala daerah diangkat oleh Presiden, yang mekanisme pemilihannya di DPRD juga dikontrol oleh Presiden. Pertanyaan lain juga muncul, kenapa hanya untuk Jakarta? atau Jakarta baru awal dari skenario besar lainnya?



PASAL 10 BAGIAN KETIGA

Soal Gubernur dan Wakil Gubernur.

1. Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh Gubernur dan dibantu oleh Wakil Gubernur.
2. Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.
3. Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
4. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

GOVERNMENT (Hal.2)
Satu per Satu
Bank 'Gurem' Bangkrut ;
OJK Setop
Izin Pendirian
BPR Baru

**GADUH
RUU DKJ**

PASAL 12

1. Gubernur dan DPRD di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibantu oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
2. Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala perangkat daerah yang berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

3. Susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. sekretariat daerah;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. inspektorat;
 - d. dinas daerah;
 - e. badan daerah; dan
 - f. Kota Administrasi/Kabupaten administrasi.

4. Perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah disusun berdasarkan beban kerja dan berbasis kinerja serta bersifat fleksibel

Satu per Satu Bank 'Gurem' Bangkrut OJK Setop Izin Pendirian BPR Baru



(Ilustrasi) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan dana nasabah akan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ada bank yang mengalami kebangkrutan. (dok.ist)

JAKARTA-Bank yang mengalami kegagalan atau bank bangkrut bertambah lagi di Indonesia. Terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha BPR Persada Guna, Pasuruan dan harus dilikuidasi. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan dana nasabah akan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar.

"Mulai kemarin malam, kami melakukan pengamatan aset," kata Sekretaris LPS, Dimas Yuliharto melalui keterangan tertulisnya, Selasa (5/12/2023).

Rekonsiliasi dan verifikasi tersebut akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha, yaitu paling lambat tanggal 4 April 2024. Pembayaran dana nasabah bakal dilakukan secara bertahap selama kurun waktu tersebut.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menargetkan jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dapat menurun menjadi dari 1.600 BPR menjadi sekitar 1.000 BPR. Kebijakan ini ditempuh untuk agar BPR di seluruh Indonesia dapat ditata lebih baik.

Dian mengatakan tidak akan mengeluarkan izin untuk pelaku usaha mendirikan BPR baru. "Tidak ada izin baru, 1.600 ini akan kita kurangi terus, jadi perkiraan kita mungkin jumlah ideal yang manageable secara sistem sekitar 1.000-an untuk serve seluruh Indonesia," kata Dian dalam konferensi pers Hasil Rapat DK OJK November 2023.

Menurutnya, kinerja rata-rata BPR

sebagaimana tampak dari total aset, penghimpunan dana, dan penyaluran kredit sebetulnya cukup baik, dan mendekati posisi sebelum COVID-19, tetapi pengurangan jumlah BPR tidak dapat dihindari karena jumlah BPR terlalu banyak.

"Yang akan terjadi kemudian adalah pengurangan BPR, sesuatu yang enggak bisa kita hindarkan karena memang jumlah BPR menimbulkan permasalahan tersendiri karena terlalu banyak," katanya.

Tata Kelola Buruk

Terpisah, Ketua Dewan Komisiner (DK) LPS Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya pernah mengatakan banyaknya rata-rata BPR jatuh tersebut disebabkan oleh tata kelola bisnis bank yang tidak memadai. Benar adanya bila berkaca dari ketiga BPR yang ditutup tersebut.

Dicontohkan, BPR Indotama UKM Sulawesi dilakukan karena pemilik tidak mau lagi menjalankan bisnis bank, tidak lagi memiliki simpanan ataupun menyalurkan kredit. Kemudian BPR Karya Remaja Indramayu (BPR KRI) ditutup pada 12 September lalu, karena adanya fraud dalam manajemen bank, dan BPR Bagong Inti Marga (BPR BIM) ditutup pada 3 Februari lalu lantaran arus keuangan yang tidak sehat.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Moch Amin Nurdin menilai bahwa akar masalah dari jatuhnya BPR adalah karena tata kelola yang kurang bagus secara umum. Di samping itu, biasanya para pemegang saham pengendali terlibat dalam kegiatan operasional BPR.

Maka dari itu, kata Amin, UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor

Keuangan (UU P2SK) memberikan kesempatan bagi BPR untuk beroperasi seperti bank umum. Dalam hal ini, ada regulasi yang ketat untuk kegiatan operasional BPR.

"Nah, ini mungkin akan memperbaiki tata kelola BPR secara umum. Dan kalau yang kemudian, ini buat saya akan terjadi seleksi alam," ujar Amin.

Dia mengatakan "seleksi alam" yang dimaksud sejalan dengan apa yang disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae. Yakni, berdasarkan kajian otoritas dalam 5 tahun ke depan jumlah BPR akan berkurang hingga lebih dari 400 entitas sehingga jumlah BPR diperkirakan akan tersisa 1.000 BPR pada tahun 2027.

"Menurut saya lebih baik jumlah sedikit daripada kemudian banyak tapi tata kelolanya menjadi kurang baik. Ini harus kemudian dibangun aturan-aturan yang membuat para pemilik akan lebih hati-hati dalam menjalankan bisnisnya," pungkas Amin.

Dalam hal ini, ia mengatakan BPR harus didorong untuk digitalisasi, peningkatan infrastruktur, dan teknologi informasi. Amin menyebut proses-proses tersebut berat, lantas akan terjadi seleksi alam bagi BPR.

Menurutnya, proses ini sama saja dengan yang terjadi dengan bank umum. Ia menilai BPR yang kecil berdasarkan aset mungkin harus melakukan merger dan akuisisi, sebagai bagian dari proses seleksi alam.

"Nah, ini banyak peminatnya kalau emang BPR-nya sehat. Karena mereka main di segmen-segmen yang tidak dijangkau bahkan oleh fintech sekalipun, mereka lebih pengalaman di sana. Ya, untuk memberikan kredit-

kredit untuk mikro," jelas Amin.

Mengingatkan saja, pada awal tahun ini telah terjadi merger 10 BPR di Indonesia Timur, yang dikepalai oleh PT Modern Multiartha (MMA). Adapun 10 BPR adalah PT BPR Modern Express, PT BPR Irian Sentosa, PT BPR Palu Lokadana Utama, PT BPR Modern Express Jateng, PT BPR Modern Express NTT, PT BPR Modern Express Sultra, PT BPR Modern Express Sulawesi Selatan, PT BPR Modern Express Papua Barat, PT BPR Modern Express Maluku Utara, dan PT BPR Modern Express Sulut.

Semua BPR tersebut akan merger menjadi satu entitas dimana yang akan menerima penggabungan adalah BPR Modern Express. Setelahnya, MMA akan menjadi pemegang saham pengendali BPR hasil merger ini dengan kepemilikan sebesar 91,4%.

Jumlah BPR pun tercatat terus berkurang. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis OJK, jumlah BPR telah menyusut 94 dari tahun 2020 yang berjumlah 1.506 menjadi 1.412 pada Agustus 2023. (wid,rls,cnbc,bis/dya)

DERETAN BANK-BANK BANGKRUT SEPANJANG TAHUN 2023:

1. BPR BIM

PT BPR Bagong Inti Marga atau BPR BIM izinnya telah dicabut pada 3 Februari 2023 lalu. Bank ini diketahui menjadi salah satu BPR besar di Kabupaten Banyuwangi. Saat ditutup, bank ini memiliki 2.907 nasabah dan simpanan senilai Rp13,64 miliar. LPS tercatat sudah mencairkan simpanan nasabah senilai Rp13,14 miliar.

2. BPR KRI

BPR Karya Remaja Indramayu atau BPR KRI dicabut izinnya oleh OJK pada 12 September 2023. Diketahui, BPR KRI memiliki lebih dari 25.176 nasabah dengan total simpanan senilai Rp285 miliar, di mana LPS telah mengganti Rp248 miliar simpanan kepada nasabah.

3. BPR Indotama UKM Sulawesi

BPR Indotama UKM Sulawesi resmi dicabut izinnya pada 15 November 2023. BPR ini beralamat di Jalan A.P. Pettarani, Ruko Bisnis Center Blok B Nomor 17, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah pencabutan izin dari OJK, kantor PT BPR Indotama UKM Sulawesi ditutup untuk umum dan BPR Indotama UKM Sulawesi menghentikan segala kegiatan usahanya.

4. BPR Persada Guna

BPR Persada Guna merupakan perusahaan di bidang perbankan yang berkembang di wilayah provinsi Jawa Timur. BPR Persada Guna fokus pada produk dan pelayanan terutama kepada nasabah kecil dan menengah serta mengembangkan pembiayaan sektor usaha mikro dan kecil serta pembiayaan modal pasar. Tercatat, BPR Persada Guna memiliki dua Kantor Kas yang keduanya terletak di Kabupaten Pasuruan.



Harga Pangan Bergerak Liar Jelang Nataru

Ketua DPR: Kawal Stabilitas Kebutuhan Pokok

JAKARTA-Mayoritas komoditas pangan mengalami kenaikan harga rata-rata secara nasional menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Mulai dari beras premium, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging ayam ras, telur ayam, minyak goreng curah.

Mengutip panel harga pangan, Selasa (5/12/2023), Badan Pangan Nasional (Bapanas) rata-rata harga beras premium hari ini 5 Desember 2023 pukul 10.00 WIB berada di level Rp15.080 per kilogram atau naik 0,47% dari harga kemarin. Selain itu kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai-cabai. Harga cabai merah keriting hari ini naik 3,11% menjadi Rp72.170 per kilogram dan cabai rawit merah naik 3,76% menjadi Rp3.190 per kilogram.

"Saya harap dari Pemerintah untuk tetap menjaga harga bahan pokok agar stabil," kata Ketua DPR RI, Puan Maharani. Melalui fungsi pengawasannya, Puan menekankan DPR akan ikut mengawal mengenai kenaikan harga bahan pokok. "Tentu kita akan memberikan pengawasan, meski masih jauh dari Natal dan tahun baru," ungkapnya.

Puan juga mengimbau seluruh anggota dewan untuk melakukan pengawasan, terutama di dapilnya masing-masing. Apalagi setiap momen Hari Raya biasanya mengakibatkan kenaikan pada sejumlah komoditi bahan pokok. "Tentu saja nantinya kita akan melakukan pengawasan tapi sampai hari ini kami tetap meminta menjaga harga bahan pokok tetap stabil," tutur Puan.

Terpisah, Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Budi Waryanto mengatakan, pemerintah memiliki beberapa solusi agar ketersediaan dan harga pangan terjaga. Untuk harga cabai misalnya, pemerintah memiliki 2 solusi, jangka pendek dan panjang

Solusi jangka pendek adalah saat harga cabai sudah melonjak sangat tinggi, Bapanas memberikan keleluasaan untuk fasilitasi distribusi pangan. "Jadi memindahkan dari harga yang produsennya tidak terlalu mahal ke daerah yang mahal. Itu adalah salah satu upaya jangka pendek," kata Budi, Selasa (5/12/2023).

Sementara untuk jangka panjang, jelas Budi, Bapanas akan memberikan bantuan. "Baru kali ini pengelolaan penyimpanan cabai itu dipikirkan, selama ini kan tidak. Jadi mereka kalau lagi panen harus cepat habis. Padahal kan bisa dikerjain, diawetkan (cabai nya)," ujarnya.

"Misalnya di Aceh ini sudah berjalan. Jadi kalau panen bisa disimpan di situ, kalau bawang merah kemarin pas lagi turun juga," paparnya.

Di sisi lain, lanjutnya, dengan mendorong pengembangan pengolahan cabai. Dia pun mencontohkan pengolahan cabai jadi cabai bubuk di



(Ilustrasi) Pedagang di beberapa pasar mengeluhkan kenaikan harga cabai yang mencapai Rp120 ribu per kilogram. (ist.dok)

Korea Selatan yang kini sudah berkembang.

"Ini kan kaum muda sekarang kalau ke restoran Korea cabainya itu kan cabai bubuk. Nah mindset itu yang harus kita edukasi terus," cetus Budi.

Sementara, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan subsidi transportasi oleh pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas harga bahan pokok di periode akhir tahun. "Menjelang periode Natal dan Tahun Baru mengenai bahan pokok yang terpenting adalah pasokan tersedia dan banyak jadi konsumsi terjaga," ujar Zulkifli Hasan di Bandar Lampung, Selasa (5/12/2023).

Ia melanjutkan kalau ketersediaan barang melimpah namun harga bahan pangan masih tinggi, maka pemerintah daerah bisa melakukan subsidi transportasi. "Di periode akhir tahun ini pemerintah daerah baik itu melalui gubernur, bupati, walikota semua bisa melakukan subsidi transportasi bagi komoditas, untuk menjaga harga pangan tetap stabil," ucapnya.

Dia menjelaskan dalam upaya melakukan stabilisasi harga pangan di akhir tahun pihaknya hanya bertugas untuk mengawasi serta dan memberikan kebijakan. Sedangkan untuk pelaksanaan kebijakan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

"Kementerian Perdagangan sifatnya hanya mengatur tetapi pelaksanaannya ada di pemerintah daerah untuk subsidi transportasi. Seperti saat ini cabai tinggi harganya karena Desember musim hujan dan produksi pasti berkurang jadi harus diantisipasi," tambahnya.

Dipicu Produksi Terbatas

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Abdullah Mansuri, menilai kenaikan harga pangan di awal-awal Desember ini terjadi karena jumlah produksi dan stok beberapa komoditas masih terbatas. Ia pun menepis kenaikan terjadi akibat permintaan tinggi di

tingkat konsumen.

"Pertama ini bukan karena permintaan besar ya. Jadi kenaikan murni karena produksi yang terbatas karena memang stok pangan terbatas itu persoalan di sana," kata Abdullah.

Abdullah menuturkan, secara pola tahunan permintaan besar di tingkat masyarakat itu justru terjadi menjelang Nataru. Puncaknya baru akan terlihat pada H-7 sampai H-3 Nataru. Setelahnya di awal-awal tahun biasanya kembali normal. "Jadi permintaan besar Nataru itu fasenya seminggu menjelang Nataru. Puncaknya di H-3 hari menjelang Natal. Itu puncaknya," ucap dia.

Pemerintah, lanjut Abdullah, harus memastikan bahwa stok yang dimiliki pemerintah atau produsen cukup untuk konsumsi masyarakat saat ini. Jika tidak cukup, maka harga sejumlah kebutuhan pokok diperkirakan akan merangkak naik pada saat jelang Nataru. "Jelang Nataru pasti saat kenaikan permintaan lebih tinggi lagi dari sekarang," kata Abdullah.

Koordinator Koalisi Rakyat untuk Keadaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, memandang bahwa perlu langkah-langkah strategis dipersiapkan oleh pemerintah. Karena kenaikan harga pada peringatan hari besar sudah dapat diprediksi dan terpola setiap tahunnya. "Pada peringatan hari besar semisal hari raya keagamaan atau tahun baru permintaan selalu meningkat sekalipun produksi cukup kerap menyebabkan kenaikan harga," katanya.

Said, pemerintah perlu melakukan pemetaan daerah yang produksi. Perhitungan produksi dan perkiraan produksi menurutnya dapat dijadikan data dasar untuk mengambil serangkaian kebijakan. Misalnya, kata Said, dari hitungan produksi stok cukup untuk menjawab kenaikan permintaan. Namun yang diperlukan upaya dan kepastian juga adalah distribusi dari daerah surplus ke yang minus

"Pemerintah harus sudah punya basis data yang akurat. Salah satunya

adanya dashboard sistem informasi pangan (pemantauan) yang dioptimalkan, sehingga pengambilan kebijakan menjadi tepat sasaran," tutur dia. Said menambahkan, kebijakan impor bisa dilakukan sebagai opsi terakhir jika seluruh kebijakan ditempuh pemerintah tidak berhasil meredam kenaikan harga di lapangan. (wid,rls,ist,tir/dya)



KENAIKAN HARGA KOMODITAS PANGAN (Per 5 Desember 2023)

BAWANG MERAH UKURAN SEDANG

Rp 32.950 per kg

↑ 2,17% - Rp 700

BAWANG PUTIH UKURAN SEDANG

Rp 37.700 per kg

↑ 0,27% - Rp 100

BERAS KUALITAS SUPER I

Rp 16.000 per kg

↑ 0,63% - Rp 100

BERAS KUALITAS SUPER II

Rp 15.500 per kg

↑ 0,65% - Rp 100

CABAI RAWIT HIJAU

Rp 67.000 per kg

↑ 1,52% - Rp 1000

CABAI RAWIT MERAH

Rp 95.900 per kg

↑ 5,27% - Rp 4800

DAGING AYAM RAS SEGAR

Rp 35.400 per kg

↑ 1,43% - Rp 500

DAGING SAPI KUALITAS I

Rp 138.050 per kg

↑ 0,33% - Rp 450

DAGING SAPI KUALITAS II

Rp 129.250 per kg

↑ 0,58% - Rp 750

Sumber: Bank Indonesia

APK Dirusak, Partai Gerindra

SURABAYA - Memasuki masa kampanye Pemilu 2024, berbagai alat peraga kampanye (APK) banyak ditemukan di berbagai tempat. Di satu sisi, pengrusakan APK juga banyak ditemukan hingga membuat geram kalangan partai yang pemilik APK. Salah satunya terjadi di Kota Kediri dan Pasuruan.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Kediri mencatat setidaknya ada 24 APK berupa baliho dan spanduk calegnya yang dirusak. Atas perusakan puluhan APK tersebut, mereka melapor ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat, pada Selasa (5/12/2023) siang. Dalam laporan itu, PAN membawa bukti-bukti foto dan rekaman kamera CCTV pelaku perusakan.

Wakil Ketua DPD PAN Kota Kediri, Anton Purba, mengatakan selain menimbulkan kerugian, perusakan APK merupakan tindakan kriminal yang tidak bisa ditolerir. "Kami sengaja laporkan ke Kepolisian dan Bawaslu karena hal ini merupakan tindakan kriminal, agar tidak terulang lagi," kata Anton Purba di Kantor Bawaslu Kota Kediri, dikutip dari beritajatim.com.

Puluhan APK milik caleg PAN yang dirusak berada di dua kecamatan yaitu, Kecamatan Kota dan Pesantren, Kota Kediri. Tetapi paling banyak ditemukan di Kecamatan Pesantren.

Menurut Anton, perusakan APK caleg PAN tersebut terjadi secara serentak. Dia menduga perusakan itu dilakukan pelaku antara hari Minggu malam atau Senin dini hari.

APK berupa baliho dan spanduk yang dirusak tersebut milik 5 caleg DPRD Kota Kediri dari PAN. Antara lain, milik Yogik Setyo Nugroho, Dinayana Kristian, Arief Setiawan, dan Nur Kholiq. Selain itu juga milik Abdullah Abu Bakar, caleg DPRD Provinsi Jatim dapil 8.

Secara visual, kata Anton, baliho dan banner tersebut dirusak dengan cara disobek. Itu diketahui dari hasil rekaman CCTV yang dibawa sebagai barang bukti.

Anton berharap warga Kediri ikut mensukseskan pemilu damai, santun dan menghormati perbedaan, tanpa kebencian dengan tidak merusak APK. Sebab, hal itu bagian strategi calon untuk memperkenalkan dirinya.

Masih kata Anton, penting untuk diketahui apabila negara ini diatur oleh Undang-undang. Salah satunya UU tentang Pemilu. "Mari kita jaga pesta demokrasi ini dengan saling menjaga, menghormati tanpa kebencian," ajaknya.

Selain ke Bawaslu, PAN Kota Kediri juga melaporkan kasus perusakan puluhan APK itu ke Polres Kediri Kota. Mereka berharap pelaku perusakan bisa ditemukan dan diproses hukum oleh kepolisian.

Pipit Suwarni, seorang Caleg dari Dapil V PDIP merasa geram setelah banner-bannernya yang sudah dipasang di beberapa ruas jalan



Salah satu APK milik PAN Kota Kediri yang dirusak

dicopot. Salah satunya di Dusun Bejigeneng, Desa Sumberejo, Kecamatan Purwosari pada Sabtu (2/12/2023) kemarin, dicopot oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini diketahui oleh Pipit pada Senin (4/12/2023) siang, Pipit menerima laporan dari timnya bahwa sejumlah banner yang dipasangnya telah dicopot dari lokasi pemasangannya. Mendengar kabar tersebut, ia segera memerintahkan timnya untuk memeriksa ke lokasi terkait.

"Saya sangat kesal saat mengetahui banner-bannernya ditemukan dibuang di sungai kering. Ini seperti sebuah penghinaan," ungkap Pipit, Selasa (5/12/2023).

Meskipun lebih baik bannernya hilang daripada dibuang, Pipit merasa tindakan tersebut tidak menghargai upaya dan menghina dirinya. Ia menyatakan kekecewaannya terhadap tindakan yang tidak pantas ini. "Saya tidak menuduh siapa yang melakukan ini, tapi yang pasti saya menemukan banner caleg lain dari partai PSI di lokasi yang sama," terangnya.

Pipit menegaskan bahwa bannernya terpasang di tempat yang sama dengan banner caleg lainnya setelah melakukan pengecekan bersama relawan. Ia menganggap tindakan ini sebagai penginjilan terhadap harga dirinya.

Saat ini, Pipit Suwarni sedang melengkapi berkas administrasi dan bersiap untuk melaporkan insiden ini ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Terpisah, Ketua Bawaslu Kota Kediri Yudi Agung Nugraha mengaku, pihaknya telah menerima laporan adanya dugaan perusakan APK dari PAN Kota Kediri. Selanjutnya, Bawaslu akan menindaklanjuti laporan itu.

"Sedang kita tangani, buat laporan. Jika sudah selesai, kita lakukan kajian awal dan masuknya ke Sentra

Gakumdu. Karena untuk tindak pidana Pemilu masuknya ke Sentra Gakumdu," jawab Yudi.

Peristiwa serupa juga terjadi di Pasuruan. Ketua DPC PDIP Perjuangan Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi, ada beberapa APK yang sengaja dirusak dan dibuang. Dia mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan tidak terpuji selama masa kampanye terbuka. "Kami berharap bahwa antar caleg, terlepas dari partai, saling menghormati dan tidak menunjukkan ketidakberesan seperti ini," ungkap AW, sapaannya.

AW menegaskan bahwa membuang banner caleg dari partai lain adalah tindakan yang tidak patut. Menurutnya, dalam demokrasi yang sehat, semua pihak seharusnya mencari dukungan dengan cara yang pantas tanpa mencoreng martabat lawan politik.

Menanggapi banner PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang lepas kemudian terbuang di Kecamatan Purwosari, Ketua DPC Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Pasuruan, Najib Martak angkat bicara. Najib mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa adanya banner PDIP yang lepas dan digantikan oleh banner miliknya.

Bahkan Najib baru saja mengetahui hal tersebut pada sore harinya setelah ramai diperbincangkan. Menurutnya banner tersebut lepas dan terbang terbawa angin hingga masuk sungai tanpa air.

"Saya baru saja tau kalau ada kejadian tersebut, karena saya sekarang ada di luar kota. Ya mungkin saja bannernya terbang dibawa angin, karena kemarin kan anginnya kencang," katanya saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (5/12/2023).

Najib menambahkan bahwa dia

akan memastikan bahwa tidak ada timnya yang melakukan pelepasan banner tersebut. Bahkan dirinya akan segera melakukan koordinasi dengan Ketua DPC PDIP Perjuangan Kabupaten Pasuruan.

Apakah pelepasan banner karena adanya Ketua DPP PSI, Kaesang Pangarep di Pasuruan? Najib membantah hal tersebut. Menurutnya itu tidak ada sangkut pautnya dengan kedatangan Ketua DPP yang gagal bertemu dengan sejumlah pelaku UMKM.

"Itu tidak benar, tidak ada sangkut pautnya. Kalau itu dilepas PSI sendiri tidak ada caleg yang berada di dapil tersebut, jadi sudah tidak perlu dibesarkan lagi," tambahnya.

Sementara itu dilain tempat Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yoenianto mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut. Dirinya akan mempelajarinya, karena tindakan pengrusakan APK merupakan tindak pidana pemilu.

"Laporan sudah diberikan ke Panwascam Purwosari. Karena pengrusakan APK merupakan dugaan tindakan pidana pemilu," jelasnya.

Di satu sisi, banyak juga APK yang dipasang tidak pada tempat semestinya sehingga harus ditertibkan, salah satunya adalah dipaku di pohon. Hal ini sesuai Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye dan Penetapan Titik Pemasangan APK.

"KPU sudah menentukan titik-titik yang sudah dipasang APK tetapi tetap menjaga estetika keindahan tata ruang kota, tidak mengganggu pengguna jalan. Itu yang lebih tau adalah pemkot karena yang punya wilayah," kata Ketua Bawaslu Surabaya, Novli Bernado Thyssen, Selasa (5/12/2023).

Novli menegaskan bahwa pemasangan APK adalah bentuk kampanye gambar yang ditancapkan di tanah. Bukan, di tancap dipohon-pohon atau ditiang listirik. "APK dipasang di pohon, dicagak (tiang) listrik, tidak diperbolehkan," tegasnya.

Jika nantinya ditemukan APK-APK yang dipasang ditempat seperi, Kata Novli, pihaknya akan bekerjasama dengan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) atau KPU maupun Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). "Nanti diinventarisir dikirim ke KPU sesuai datanya untuk kemudian ditertibkan," kata dia.

Lebih lanjut Novli menambahkan bahwa Bawaslu akan menyampaikan pelanggaran-pelanggaran di masa kampanye dalam 10 hari sekali. "Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama kampanye, yang terbesar, temuan berapa, yg masuk berapa. Selama tahapan kampanye ini kami masih menginventarisir," kata dia. (lut/dya)

Sebanyak 18 Orang Meninggal Akibat Erupsi Gunung Marapi

BUKITTINGGI - Erupsi Gunung Marapi telah memakan sejumlah korban meninggal dan luka-luka. Dilansir dari laman Humas Polri, Wakapolda Sumbar Brigjen Edi Mardiyanto menyampaikan bahwa terdapat 18 pendaki Gunung Marapi terindikasi meninggal dunia imbas erupsi Gunung Marapi di Agam dan Tanah Datar, Sumbar di dua lokasi sekitar Gunung Marapi tersebut.

Lokasi pertama terdapat 10 orang terindikasi meninggal, sementara di lokasi kedua terdapat 8 orang. Evakuasi terus dilakukan dengan penambahan personel untuk mempercepat prosesnya.

Sebelumnya, tiga orang korban erupsi Gunung Marapi dinyatakan meninggal dunia pada Senin (4/12/2023) malam. Ketiga korban tersebut merupakan bagian dari tujuh korban yang diterima Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), yang ditunjuk sebagai Posko Antemortem.

"Sejak pagi hingga malam ini RSAM menerima total tujuh korban yang merupakan pendaki Gunung Marapi yang mengalami erupsi. Empat menderita luka bakar dan tiga lainnya meninggal," kata Direktur Utama RSAM Busril di Bukittinggi, Selasa (5/12/2023).

Ia merinci ketujuh korban adalah Aditya (21) jenis kelamin laki-laki asal Pekanbaru dengan kondisi selamat dan menderita luka bakar. Pasien kedua atas nama Zhafirah (19), perempuan asal Padang, dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Jamil Kota Padang. Pasien ketiga atas nama Naomi (19) jenis kelamin perempuan dengan kondisi selamat dan diizinkan pulang bersama keluarganya.

"Pasien keempat, Achmad Firman (20) laki-laki menderita luka bakar juga dirujuk ke Padang," kata Busril.

Sementara tiga korban yang dinyatakan meninggal dunia masing-masing, Muhammad Adan (21) dan Nazatra (22) asal Pekanbaru, Riau, serta Muhammad Teguh (20) asal Padang.

"Data semua korban sudah diketahui, mereka yang luka bakar dalam perawatan maksimal. Satu orang korban selamat nama Naomi asal Pekanbaru sudah dinyatakan bisa dibawa pulang keluarganya," kata Busril.

Menurutnya, proses identifikasi sudah disesuaikan dengan protokol Disaster Victim Identification (DVI) Polda Sumbar hingga identitas korban sudah diketahui secara pasti.

"Sudah sesuai prosedur DVI Polda Sumbar ditambah pencocokan dengan keluarga dan kerabatnya, saat ini hanya satu keluarga korban yang belum berada di RSAM," katanya.



Proses evakuasi pendaki tewas akibat erupsi Gunung Marapi di Nagari Batu Plano, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa, (5/12/2023). Foto: Tim Gabungan Penanganan Darurat Erupsi Gunung Marapi

Tim SAR gabungan terus berupaya melakukan evakuasi, namun kendala utama yang dihadapi adalah erupsi yang terus berlangsung, membuat proses evakuasi menjadi sulit.

Menurut Kepala Kantor SAR Kelas A Kota Padang, Abdul Malik, sebanyak 6 pendaki yang terjebak erupsi Gunung Marapi Sumatera Barat berhasil dievakuasi, 8 orang pendaki lagi yang masih dalam tahap evakuasi dan 12 orang lainnya masih belum ditemukan.

Dari 6 orang yang berhasil dievakuasi, 3 diantaranya telah dinyatakan meninggal dunia, sementara 3 lainnya dalam keadaan kritis atau kode merah. Abdul Malik juga menjelaskan bahwa identitas para pendaki masih dalam proses identifikasi oleh pihak DVI Polda Sumbar. Selain itu, masih ada, "Para pendaki gunung telah dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Muchtar Kota Bukittinggi," katanya.

Hingga saat ini, korban yang berhasil dievakuasi sebanyak 55 orang dari total pendaki 75 orang yang terdapat di website BKSDA Sumbar. Proses evakuasi terus dilakukan meskipun tim terkendala oleh erupsi yang terus terjadi setiap 15 menit.

Tim SAR gabungan masih mengupayakan proses evakuasi 18 pendaki yang masih terjebak pasca erupsi Gunung Marapi. Erupsi yang terus terjadi menjadi kendala utama tim, dengan erupsi tercatat terjadi 6 kali hanya dalam satu hari.

"Kami terus upayakan proses evakuasi. Tim terkendala karena erupsi terus terjadi di kawah Gunung Marapi Sumatera Barat, hari ini saja kami menghitung ada 6 kali," ujar Abdul Malik saat diwawancarai Tempo di Pos Jalur Pendakian Marapi Via Batu Palano pada Selasa (5/12/2023).

Sekarang masih ada 10 pendaki yang belum ditemukan. Dugaan tim di lapangan para pendaki tersebut berada di sekitar kawah. Hal tersebut berdasarkan penemuan 2 pendaki oleh masyarakat pada Senin 4 Desember 2023.

Sementara itu, Humas Kantor SAR Kota Padang, Sumatera Barat, Jody Harryawan menyatakan sebanyak 12 orang pendaki Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dalam pencarian.

"Semua ada 75 orang meliputi 49 orang sudah turun, 26 orang belum (turun). Dari 26 orang itu tiga orang selamat, 11 meninggal, dan 12 orang masih pencarian," katanya dikutip dari Antara, Senin (4/12/2023).

Jody menjelaskan terdapat total 75 orang pendaki Gunung Marapi dengan 49 orang diantaranya sudah turun dan sebanyak 26 orang sisanya belum turun.

Dari 26 orang yang belum turun meliputi sebanyak 11 orang pendaki dalam keadaan meninggal dunia yang sedang dibawa oleh tim gabungan untuk turun, tiga orang pendaki dalam proses turun, dan 12 orang yang belum ditemukan.

"Yang 14 orang sudah ditemukan tim SAR tapi kondisinya 11 orang meninggal dan sudah di-packing, sedangkan tiga orang (selamat) belum sampai bawah karena mereka masih proses evakuasi ke posko," kata Jody.

Jody menjelaskan proses pencarian para pendaki sempat dihentikan pada Senin (4/12/2023) pukul 10.00 WIB sampai 12.00 WIB karena Gunung Marapi terus mengalami erupsi sehingga para tim gabungan menyelamatkan diri terlebih dahulu.

Meski tim gabungan sempat kembali ke bawah untuk menyelamatkan

diri dari erupsi, namun proses pencarian saat ini sudah kembali dilanjutkan seiring dengan meredanya erupsi Gunung Marapi.

Secara rinci Jody menyebutkan terdapat ratusan orang yang tergabung dalam tim gabungan ini, baik yang berada di Gunung Marapi maupun di posko bawah.

Ratusan orang tersebut terdiri dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas), pemadam kebakaran, dan sebagainya, baik dari Provinsi Sumatera Barat maupun provinsi sekitar.

"Timnya yang di gunung saja itu 120 orang yang sudah naik, di posko lebih dari itu. Tadi dihentikan sementara karena ada erupsi susulan, jadi mereka menyelamatkan diri. Sekarang sudah mulai melakukan pencarian lagi," kata Jody.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan kepolisian sudah memberikan respons bantuan bagi korban erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat. Salah satunya dengan mengirimkan personel untuk membantu evakuasi pendaki yang terjebak di gunung itu.

Listyo Sigit berujar personel yang dikirim berasal dari kepolisian daerah setempat di kawasan Gunung Marapi. "Untuk masalah peristiwa bencana yang terjadi, kami tentunya segera dan saat ini saya kira wilayah sudah menurunkan tim untuk melakukan langkah-langkah mitigasi," kata Listyo Sigit saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (5/12/2023).

Menurut Listyo Sigit, kepolisian sedang melakukan evakuasi dan pertolongan kepada para korban. "Kemudian langkah-langkah lanjut, termasuk pertolongan dan sebagainya, saat ini sedang dilaksanakan," ujarnya.

Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Barat Komisaris Besar Dwi Sulistyawan menyatakan pihaknya telah mengirim personel untuk membantu penanganan bencana alam akibat erupsi Gunung Marapi. "Sejak semalam sudah diturunkan," kata dia melalui keterangan tertulis pada Senin, 4 Desember 2023.

Erupsi Gunung Marapi yang berada di Tanah Datar, Sumatera Barat, terjadi pada Minggu siang, 3 Desember 2023. Personel yang diturunkan dari Direktorat Samapta dan Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda Sumbar.

Dwi Sulistyawan mengatakan, bantuan personel kepolisian itu untuk membantu evakuasi korban yang terjebak di Gunung Marapi pasca-erupsi. Kepolisian Resor terdekat di Sumatera Barat pun sudah diturunkan dalam penanganan korban. (lut/tempo/dya)

Antisipasi Bencana, Pemkot Batu Kebut Pembangunan 2 Plengsengan Senilai Rp 1,4 Miliar

BATU - Antisipasi bencana yang sering terjadi di akhir tahun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu membangun plengsengan di dua lokasi. Dana sebesar Rp 1,4 miliar dialokasikan untuk proyek yang ditarget selesai pertengahan Desember 2023 tersebut.

Dari total anggaran itu, Kepala Bidang Bina Marga, Eko Setyawan, menjelaskan, sekitar Rp 840 juta digunakan untuk pembangunan plengsengan di Desa Mojorejo. Sementara plengsengan di jurang Susuh, Desa Giripurno, mendapat alokasi anggaran sekitar Rp 580 juta.

"Jadi dana ini berasal dari APBD 2023 melalui dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Mengingat akhir tahun ini dikhawatirkan intensitas hujan tinggi yang bisa berpotensi bencana. Maka, kami menargetkan pembangunan dua plengsengan yang melelan anggaran sekitar Rp 1,4 miliar ditargetkan pertengahan Desember 2023 ini tuntas," ujar Eko, saat dikonfirmasi awak media, Selasa (5/12/2023).

Dalam spesifikasi teknisnya, Eko menyebutkan bahwa plengsengan di Desa Mojorejo, memiliki dimensi lebar 20 meter dan tinggi 15 meter. Menurutnya, pengerjaan plengsengan tersebut juga telah dimulai sejak November 2023. "Nanti juga akan



Pembangunan Plengsengan di Desa Mojorejo Kota Batu. (Santi/Lenteratoday)

dilanjut dengan pelebaran jalan yang awalnya lebar 4 meter menjadi 8 meter," sambungnya.

Lebih lanjut, terkait plengsengan yang berlokasi di jurang Susuh, Desa Giripurno. Eko mengatakan bahwa plengsengan tersebut memiliki ukuran panjang 20 meter dengan tinggi 15 meter, sedangkan total kebutuhan material sekitar 600 kubik. Eko juga menyebut rencana pemasangan guard rail sepanjang 50 meter serta pelebaran jalan menjadi 3

meter dengan panjang 50 meter di plengsengan ini.

"Yang jelas, pembangunan plengsengan ini sangat penting. Mengingat, akhir tahun hingga tahun baru kunjungan di Kota Batu biasanya melonjak," tegasnya.

Eko berharap pembangunan plengsengan ini tidak hanya akan meningkatkan keamanan bagi pengguna jalan di Kota Batu. Tetapi juga menjadi langkah preventif menghadapi potensi bencana alam.

Serta menunjukkan komitmen DPUPR Kota Batu dalam menjaga infrastrukturnya. (Santi/dya)



Jadi dana ini berasal dari APBD 2023 melalui dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Mengingat akhir tahun ini dikhawatirkan intensitas hujan tinggi yang bisa berpotensi bencana. Maka, kami menargetkan pembangunan dua plengsengan yang melelan anggaran sekitar Rp 1,4 miliar ditargetkan pertengahan Desember 2023 ini tuntas,"

EKO SETYAWAN

Kepala Bidang Bina Marga

Operasi Penertiban Parkir Liar di Kota Malang, Dishub Gembok Kendaraan Pelanggar di Sekitar RSSA



Penertiban parkir liar di sekitar RSSA Malang oleh personel gabungan Dishub dan TNI/Polri Kota Malang, Selasa (5/12/2023). (Dok. Dishub Kota Malang)

MALANG - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, melakukan penertiban parkir liar di sekitar Rumah Sakit dr Saiful Anwar (RSSA), Selasa (5/12/2023). Kabid Perparkiran Dishub Kota Malang, Mustaqim Jaya, menyebutkan penertiban parkir liar tersebut

menggunakan metode penggembokan kendaraan yang terbukti melanggar aturan.

Dalam penertiban ini, melibatkan petugas Dishub bersama tim gabungan TNI Polri, POM AD, dan Satpol PP Kota Malang. Yang berhasil melakukan penggembokan terhadap 8

mobil yang melanggar rambu larangan parkir.

"Karena kan tidak ada jukir, rata rata pengunjung RSSA parkir di bawah rambu larangan parkir. Sering kita operasi di situ. Ini juga bukan kali pertama kita operasi parkir liar di sini. Misal sekarang dilakukan penindakan, kadang 2-4 hari itu sudah muncul lagi parkir seperti ini," ujar Mustaqim, saat dikonfirmasi usai penertiban tersebut, Selasa (5/12/2023).

Pria yang akrab dengan sapaan Taqim, ini juga berharap agar masyarakat dapat turut membantu penertiban parkir di area tersebut. Pihaknya juga mengimbau khususnya pada petugas keamanan RSSA, untuk dapat memberikan peringatan kepada pengunjung terkait larangan parkir di area ini.

Lebih lanjut, Mustaqim menghendaki bahwa kurangnya efek jera dari tindakan yang selama ini dilakukan Dishub, merupakan faktor utama yang menyebabkan seringnya pelanggaran parkir di Jalan Pattimura ini. Sebab selama ini, menurutnya

Dishub hanya berwenang untuk memberikan surat pernyataan bermaterai kepada para pelanggar, untuk tidak mengulangi perbuatannya.

"Tapi kan Dishub hanya bersifat pembinaan, pernyataan di atas materai untuk tidak mengulangi lagi. Nah ternyata dampaknya kan ndak ada. Jadi kami mohon dukungan dari pihak kepolisian sekali-kali, agar memang tilang aja di situ, diberikan surat tilang atau pakai mobil incarnya yang sudah ada di Polresta Malang itu," jelasnya.

Di sisi lain, Mustaqim juga mengimbau kepada karyawan RSSA untuk dapat mematuhi ketentuan parkir di sekitar wilayahnya. Meskipun RSSA telah mengajukan AMDAL lalin yang memenuhi syarat, ia meminta dukungan lebih tegas dari pihak direktur RSSA kepada karyawan, agar tidak parkir di luar area yang telah ditetapkan.

"Karena beberapa kali yang kami angkut itu kan kendaraan roda dua itu yang ada stikernya dari RSSA. Karena saya anggap mereka sudah tahu, tapi mereka masih parkir di luar," tukasnya. (Santi/dya)

Mahalini Respon Penonton Teriak “Pinjam Dulu Seratus”

MOMEN unik terjadi saat Mahalini manggung di acara Social Chic yang diadakan di Surabaya, Jawa Timur.

Di sela-sela penampilannya, Mahalini menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan ribuan penonton yang memadati area panggung.

Ketika Mahalini sedang menyapa, salah satu penonton berteriak untuk meminjam uang ke pelantun “Sial” tersebut.

“Pinjam dulu seratus (ribu rupiah),” teriak salah satu penonton ke Mahalini seperti dikutip dari akun TikTok @fajar_afath.

Tak disangka, Mahalini menjawab teriakan penonton yang hendak meminjam uang tersebut meski tak diketahui penonton itu serius atau bergurau.

“Benar mau dikasih seratus?” tanya Mahalini ke penonton tersebut.

“Iya...” sahut penonton yang belum diketahui namanya itu.

Tak lupa, sebelum mewujudkan permintaan penonton itu, Mahalini mengingatkan agar tak lupa untuk mengganti uang yang akan dipinjam tersebut.

“Tapi besok balikin ya?!” ucap Mahalini mengingatkan.

Setelahnya, Mahalini meminta ke salah satu kru panggung untuk mengambilkannya uang sebesar Rp 100.000 untuk ia berikan kepada penonton.

“Mana seratus sini, ada enggak? Nanti aku yang ganti ke kamu,” ucap Mahalini ke salah satu kru panggungnya.

Karena tak memegang uang tunai, Mahalini menyebut dirinya akan

mengganti uang yang ia pinjam dari kru.

“Ini aku kasih ke kamu, tapi nanti aku tetap ganti ke dia (kru),” ucap Mahalini sembari memberikan uang Rp 100.000 ke penonton.

Penonton yang lain pun terkejut dan berseru setelah melihat Mahalini benar-benar meminjamkan uang ke penonton.

“Itu uang Rp 100.000-nya ya? Tapi entar jangan lupa balikin,” ucap Mahalini kembali mengingatkan.

Momen Mahalini meminjamkan uang Rp 100.000 ini banyak divideokan penonton lainnya. Tak ayal, videonya pun menjadi viral di media sosial.

Profil

Ni Luh Ketut Mahalini Ayu Raharja atau yang lebih dikenal dengan nama Mahalini adalah seorang penyanyi kelahiran 4 Maret tahun 2000. Penyanyi jebolan Indonesian Idol musim kesepuluh tahun 2020 tersebut lahir di Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Mahalini terlahir dari keluarga yang menganut agama Hindu dan bersuku adat Bali. Bahkan nama depan menggunakan nama khas Bali Ni Luh yang berarti berjenis kelamin perempuan. Sedangkan Ketut menandakan bahwa dirinya anak keempat.

Kekasih Rizku Febian ini merupakan anak dari

pasangan I Gede Suraharja dan Ni Nyoman Serini. Ia diketahui memiliki dua kakak laki-laki bernama I Gede Dion Raharja dan I Made Jody Raharja dan seorang kakak perempuan.

Mahalini Raharja diketahui tinggal di Dusun Banjar Aseman Kawan, Tibubeneng, Kuta Utara, Kabupaten Badung. Ia telah mengikuti kursus vokal sejak kelas 5 SD.

Sudah menekuni dunia vokal sejak kecil, Mahalini memulai kariernya sebagai penyanyi nasional saat masih duduk di bangku SMP. Ia telah merilis single pertamanya yang berjudul Bawa Dia Kembali pada tahun 2015.

Hal tersebut berawal saat dirinya digandeng produser musik asal Jakarta dan diorbitkan oleh Sandhora

Production. Di tahun 2015, ia bahkan pernah menjadi peserta dalam ajang FLS2N dan maju ke tingkat Nasional setelah menjuarai ajang di Provinsi Bali.

Sebelum mengikuti Indonesian Idol, Mahalini juga sudah sering mengikuti berbagai lomba nyanyi baik tingkat daerah maupun nasional. Usai tereliminasi di babak lima besar, namanya semakin dikenal dan kini telah merilis sejumlah single dan album (berbagai sumber)



SAKIT RADANG PARU

BISA SEBABKAN PENYAKIT DIABETES

BUKAN hanya perkara pola makan yang tidak terkontrol, ternyata sakit radang paru alias pneumonia bisa menyebabkan penyakit diabetes.

Fakta ini disampaikan langsung Dokter Spesialis Penyakit Dalam dr. Rudy Kurniawan, Sp.PDBAH.

Ia mengatakan bahwa penyakit infeksi seperti pneumonia dan radang paru merupakan kondisi stres metabolik yang bisa menyebabkan diabetes.

"Meningkatkan stres metabolik (sindrom metabolik) menyebabkan diabetes juga, semua kondisi stres pada tubuh berpengaruh pada risiko diabetes," ujar dr. Rudy dalam acara diskusi di Jakarta Selatan.

Sindrom metabolik adalah sekumpulan kondisi yang dapat meningkatkan risiko seseorang terhadap penyakit jantung, stroke, atau diabetes. Contohnya yaitu kadar gula darah yang tinggi, kelebihan lemak di sekitar pinggang, serta kenaikan kadar kolesterol yang tidak biasa.

Menurut dr. Rudy bukan hanya pneumonia atau radang paru yang dinilai sebagai salah satu kondisi berat, bahkan sekedar kekurangan tidur juga meningkatkan risiko sakit diabetes.

Pneumonia adalah suatu peradangan akibat bakteri atau virus pada paru yang menyebabkan adanya gangguan fungsi pada paru. Gejalanya menimbulkan demam, batuk hingga sesak napas.

Beberapa virus yang umum menyebabkan pneumonia adalah virus influenza, respiratory syncytial virus (RSV), dan SARS-CoV-2. Sementara jenis bakteri yang umum menyebabkan pneumonia adalah *Streptococcus pneumoniae*.

Kondisi ini juga berlaku sebaliknya orang dengan diabetes menyebabkan pneumonia, karena gula darah tinggi pada penyandang diabetes bisa menyebabkan sistem kekebalan tubuh terganggu.

Salah satunya membuat sel darah putih pada sistem imun kinerjanya jadi tidak maksimal.

"Jadi sel darah putih ini tentaranya tubuh, kalau tentaranya tidak bisa aktif, sehingga ada kuman masuk tapi tentara lemah jadi tidak bisa melawan infeksi dan terjadilah pneumonia," kata dr. Rudy.

Kondisi yang berbahaya, yaitu diabetes mengalami komplikasi karena adanya kontraindikasi, sehingga tidak boleh sembarang mendapat obat atau vaksin.

"Jadi solusinya mencegah pneumonia, sangat penting pasien diabetes mendapatkan vaksin pneumonia. Apalagi pasien diabetes yang mudah terinfeksi penyakit, sangat disarankan semua jenis vaksin agar tidak terjadi komplikasi parah," pungkas dr. Rudy.

Sekedar informasi, diabetes jadi salah satu penyakit yang menarik perhatian, khususnya mereka yang memiliki riwayat diabetes di

keluarganya.

Data 2021, jumlah pengidap diabetes sebanyak 19,47 juta di Indonesia.

Diabetes mellitus (DM) adalah penyakit kronis yang ditandai oleh kadar gula darah tinggi lebih dari 200 mikrogram per desiliter (> 200 mg/dL).

Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi sistem metabolik tubuh, tetapi juga dapat meningkatkan risiko terhadap berbagai penyakit lainnya, termasuk pneumonia yang bisa menjadi lebih serius pada individu dengan diabetes.

Mengutip halodoc, penyakit ini biasanya dialami orang dewasa ataupun orang tua yang umumnya sudah mengidap penyakit lain seperti stroke, jantung, diabetes, infeksi saluran pernapasan ataupun perokok berat. Oleh karena itu, terkadang orangtua tidak sadar jika anak-anak juga rentan terhadap pneumonia.

Saat anak mengidap batuk pilek, umumnya orangtua hanya menganggap penyakit ringan yang biasa, padahal bisa saja gejala pneumonia.

Menurut World Health Organization (WHO), 99 persen kematian yang terjadi pada

masyarakat dunia berpenghasilan menengah ke bawah diakibatkan oleh pneumonia dan ini sudah termasuk pada kematian pada anak di bawah 5 tahun.

Salah satu penyebabnya adalah karena anak-anak yang berasal dari lingkungan masyarakat menengah ke bawah tidak memiliki daya imun yang baik.

Kondisi tersebut diakibatkan kekurangan gizi dan tidak disusui secara eksklusif, sehingga mereka rentan terhadap penyakit. Untuk itu, perlu mengetahui gejala pneumonia untuk meningkatkan kewaspadaan. (Berbagai Sumber)





7 ISTILAH AI YANG WAJIB DIKETAHUI

KECERDASAN Buatan atau artificial intelligence (AI) terus dikembangkan oleh berbagai perusahaan. Mereka bahkan menciptakan produk AI melalui berbagai fitur, termasuk chatbot.

Chatbot AI dari OpenAI yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menjawab pertanyaan apapun disebut ChatGPT, saat ini merupakan alat berbasis AI terpopuler yang telah dirilis pada November 2022.

ChatGPT, alat ini dapat membantu Anda dalam tugas seperti menulis puisi, resume, hingga rencana liburan.

Namun, butuh waktu hingga akhir tahun 2022 bagi sebagian besar orang di luar industri teknologi untuk mulai membicarakan AI.

Perlu diingat, Chatbot AI hanyalah salah satu bagian dari dunia AI. Dengan adanya AI dapat memanfaatkan ChatGPT untuk mempermudah pekerjaan adalah tren yang sedang berkembang.

Ini semua karena kemajuan terbaru dalam pembelajaran mesin membawa kita ke tingkatan baru. terobosan besar dengan dampak besar pada hampir setiap aspek kehidupan.

Seiring dengan terbiasanya masyarakat dengan dunia AI, tentunya istilah-istilah baru akan bermunculan di mana-mana. Berikut istilah-istilah AI yang perlu Anda ketahui:

1. Pembelajaran mesin (Machine learning / ML)

Jika AI adalah tujuannya, maka machine learning adalah cara kita mencapainya. Pembelajaran mesin adalah bidang komputasi AI, manusia mengajarkan sistem komputer bagaimana melakukan sesuatu, melatih mereka untuk mengidentifikasi pola dan membuat prediksi berdasarkan pola tersebut.

Data dijalankan berulang kali melalui algoritme, setiap kali

memberikan masukan dan umpan balik yang berbeda untuk membantu mesin mempelajari dan meningkatkan kinerja selama pelatihan.

Nah, itulah mengapa large language model (LLM) yang menggunakan machine learning seperti Bing Chat dan ChatGPT.

2. Model bahasa besar (Large language model / LLM)

Large language models (LLM) menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk membantu memproses bahasa, sehingga dapat meniru cara manusia berkomunikasi. LLM merupakan sistem komputer yang terinspirasi oleh otak manusia, seperti sekumpulan node dan koneksi yang mensimulasikan sel-sel neuron dan sinapsis di otak manusia

Model dilatih menggunakan teks berjumlah besar untuk mempelajari pola dan hubungan dalam bahasa, guna membantu model menggunakan kata-kata manusia.

Kemampuan pemecahan masalah mereka dapat digunakan untuk menerjemahkan bahasa, menjawab pertanyaan dalam bentuk chatbot, merangkum teks, dan bahkan menulis cerita, puisi, serta code komputer.

3. Generative AI Generative

AI memanfaatkan kekuatan large language models untuk membuat hal baru, bukan hanya mengulang atau memberikan informasi yang sudah ada.

Tak hanya itu, generative AI mempelajari pola dan struktur, dan kemudian menghasilkan sesuatu yang mirip namun baru. Generative AI dapat membuat hal-hal seperti gambar, musik, teks, video, dan code. Ia dapat digunakan untuk membuat karya seni, menulis cerita, mendesain produk, dan bahkan membantu dokter mengerjakan tugas administratif.

Namun, ia juga dapat digunakan oleh aktor jahat untuk membuat berita palsu, atau gambar yang terlihat seperti foto tetapi tidak nyata. Hal ini dikarenakan perusahaan teknologi sedang mengembangkan cara untuk mengidentifikasi konten yang dihasilkan AI dengan jelas.

4. Artificial intelligence (AI)

AI adalah sistem komputer yang sangat cerdas, yang dapat meniru manusia dalam beberapa hal. Sebagai contoh, memahami apa yang disampaikan orang, membuat keputusan, menerjemahkan bahasa, menganalisis apakah sesuatu bernada negatif atau positif, dan bahkan belajar dari pengalaman.

Sifatnya buatan karena kecerdasannya dibuat oleh manusia menggunakan teknologi. Kadang orang mengatakan sistem AI memiliki otak digital, tetapi AI bukanlah mesin atau robot fisik. AI adalah program yang berjalan di komputer. Sistem bekerja hanya dengan memasukkan koleksi data yang sangat besar melalui algoritma yang merupakan serangkaian instruksi untuk membuat model.

5. Responsible AI Responsible

AI memandu manusia kala mencoba merancang sistem yang aman dan adil di setiap level, termasuk model machine learning, perangkat lunak, user interface, serta aturan dan batasan yang diberlakukan untuk mengakses aplikasi.

Praktik Responsible AI adalah elemen penting karena sistem AI sering ditugaskan untuk membantu membuat keputusan penting yang menyangkut manusia, seperti dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Namun, karena AI dibuat oleh manusia dan dilatih menggunakan data dari dunia yang tidak sempurna,

AI dapat mencerminkan bias tertentu.

6. Halusinasi

Sistem generative AI dapat membuat cerita, puisi dan lagu, tetapi kadang-kadang manusia ingin hasil dari generative AI didasarkan pada kebenaran. Hal ini dikarenakan sistem AI tidak dapat membedakan antara yang nyata dan palsu, generative AI dapat memberikan tanggapan yang tidak akurat.

Fenomena ini disebut developer sebagai halusinasi, atau istilah yang lebih akurat, fabrikasi. Ini mirip seperti saat seseorang melihat sesuatu yang mirip seperti garis wajah manusia di bulan, dan mengatakan bahwa betul-betul ada manusia di bulan.

Developer mencoba menyelesaikan isu ini melalui grounding, sebuah teknik memberikan informasi tambahan dari sumber tepercaya kepada sistem AI, untuk meningkatkan akurasi AI tentang topik tertentu. Kadang-kadang prediksi sistem juga bisa salah jika model tidak memiliki informasi terkini (Bisnis)





SETOP MAKAN TELUR SAAT KOLESTEROL TINGGI

TELUR mengandung berbagai nutrisi, namun bagi orang-orang yang mengkhawatirkan kesehatan jantungnya khususnya kadar kolesterol, keputusan untuk memasukkan telur ke dalam menu makanan mungkin tampak tak mudah.

Hal ini karena telur mendapat reputasi buruk selama bertahun-tahun yakni kandungan kolesterolnya.

Padahal, berbicara kandungan gizi, kuning telur mengandung banyak vitamin A, vitamin B12, selenium, dan kolin. Sementara telur utuh mengandung lebih banyak nutrisi yakni asam lemak omega-3, vitamin A, dan vitamin E yang lebih tinggi.

Selain itu, telur memang mengandung kolesterol tinggi. Satu butir telur berukuran besar mengandung sekitar 186 mg kolesterol.

Tetapi, kolesterol makanan seperti yang terdapat dalam telur mungkin tidak berdampak negatif pada kolesterol darah atau berkontribusi terhadap risiko penyakit jantung.

Satu hal yang perlu dicatat, walau telur mempunyai sedikit pengaruh terhadap kadar kolesterol, dampaknya

bisa berbeda-beda pada setiap orang.

"Kandungan lemak yang kita makan berdampak pada berapa lama partikel LDL berada dalam aliran darah kita, jadi sebagian efeknya dimediasi melalui kandungan lemak pada telur," kata pakar jantung dari NYU Langone Health Gregory Katz, MD.

Lalu, berapa banyak telur yang bisa dimakan saat kolesterol tubuh tinggi?

Kebanyakan orang sehat boleh makan 1-2 butir telur per hari, selama telur tersebut merupakan bagian dari pola makan bergizi secara keseluruhan.

Pakar diet di Englewood Health dan Mount Sinai Hospital Jessica Gelman, MS, RD merekomendasikan orang-orang memanfaatkan berbagai sumber protein tanpa lemak sehingga tidak terlalu bergantung pada telur.

Juga, pertimbangkan sarapan yang menyehatkan jantung dan kaya serat seperti orak-arik sayuran yang dimasak dengan minyak zaitun dengan tambahan roti gandum dan buah.

Jika seseorang memiliki kolesterol tinggi, dia tidak perlu menghindari telur. Meskipun telur memiliki jumlah

kolesterol dan lemak yang lebih tinggi, makanan ini telur juga merupakan bagian dari pola makan sehat.

Dia juga perlu mempertimbangkan untuk mengurangi sumber lemak jenuh dan lemak trans serta kolesterol dalam makanan dan dalam hal ini yang terbaik adalah membatasi konsumsi telur hingga 4-5 butir per minggu.

Hal ini juga berlaku bagi orang yang memiliki kelebihan berat badan, obesitas, atau faktor risiko penyakit jantung lainnya.

Beberapa individu juga secara genetik cenderung memiliki kadar kolesterol darah tinggi seperti orang dengan kelainan genetik hiperkolesterolemia familial atau pembawa varian gen APOE4, sehingga perlu berkonsultasi dulu dengan dokter atau tenaga kesehatan terkait konsumsi telur.

Sesuai batas

Sebelumnya, Ahli gizi Ulva Rezatiara, S.Gz., MPH dari Universitas Gadjah Mada mengatakan orang yang punya kolesterol tinggi boleh makan telur asal jumlahnya tetap sesuai batas.

"Penderita kolesterol masih aman

untuk mengonsumsi telur dengan catatan mengonsumsi secukupnya atau tidak berlebihan dan tetap menjaga pola makan dan gaya hidup sehat," kata Ulva.

Namun, dia tetap menyarankan orang yang punya penyakit kolesterol untuk berkonsultasi dulu kepada dokter sebelum mengonsumsi telur agar mengetahui porsi yang tepat untuk dirinya. Dia menjelaskan telur memang akan menyebabkan kadar kolesterol naik jika dikonsumsi secara berlebihan. Bagian kuning telur mengandung lebih banyak kolesterol dibandingkan bagian putih telur.

Untuk orang-orang dewasa yang sehat pada umumnya, batas konsumsi telur maksimal adalah satu hingga dua butir per hari, sesuai rekomendasi dari The American Heart Association.

Meski demikian, batas konsumsi maksimal akan berbeda tergantung dari kondisi setiap individu. Menurut Ulva, orang dengan indikasi penyakit tertentu seperti jantung, kolesterol, dan diabetes memiliki batas konsumsi telur maksimal yang berbeda dengan orang sehat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan tubuh (Ant)

"Penderita kolesterol masih aman untuk mengonsumsi telur dengan catatan mengonsumsi secukupnya atau tidak berlebihan dan tetap menjaga pola makan dan gaya hidup sehat,"

Ulva Rezatiara, S.Gz., MPH (Ahli gizi Universitas Gadjah Mada)



Pro-Kontra Daerah ... (dari Hal 1)

ANGGOTA DPR Fraksi Nasdem dari daerah pemilihan DKI Jakarta III, Ahmad Sahroni mengaku tidak setuju dengan Pasal 10 ayat 2 tentang Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Dalam pasal itu berbunyi "Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memerhatikan usul atau pendapat DPRD".

"Secara pribadi saya enggak setuju, sebagai pribadi wakil Jakarta ini kemunduran demokrasi," kata Sahroni, Selasa (5/12/2023).

Kebijakan ini, kata dia, akan menimbulkan pertanyaan mengapa hanya Jakarta yang akan menerapkan penunjukan gubernur oleh presiden. Mengapa ketentuan serupa tidak diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. "Kalau mau demikian, kenapa enggak semuanya ditunjuk presiden sampai ke walikota, itu lebih baik daripada hanya dikhususkan Jakarta," tanya Sahroni.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini kemudian ditanya langkah selanjutnya yang akan ditempuh sebagai anggota DPR wakil Jakarta menanggapi draf tersebut. Ia mengaku akan melaporkan terlebih dulu kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terkait draf RUU DKJ khususnya pasal tersebut. "Ini pandangan pribadi dan nanti saya lapor ke Ketua Umum Nasdem," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR terkait RUU DKJ, Achmad Baidowi membenarkan bahwa kemungkinan Pemilihan Kepala Daerah di DKI Jakarta dihilangkan setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara. Hal ini mengacu pada draf RUU DKJ yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna.

Meski menghilangkan pilkada langsung, pria yang karib disapa Awiek itu menegaskan bahwa proses demokrasi tetap berlangsung melalui usulan DPRD. "Untuk menjembatani keinginan politik antara yang menginginkan kekhususan ditunjuk secara langsung dan kedua supaya kita tidak melenceng dari konstitusi, cari jalan tengah bahwa gubernur Jakarta itu diangkat, diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usulan atau pendapat dari DPRD," kata Awiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Sebelumnya, Fraksi PKS DPR RI menolak RUU Daerah Khusus Jakarta menjadi usul inisiatif DPR RI. Salah satu alasan penolakan PKS yakni pasal yang mengatur gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta (JK) diangkat dan diberhentikan presiden.

"Jelas dan tegas PKS menolak RUU ini. Jangan kabiri hak demokrasi warga Jakarta," kata Anggota Baleg DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (5/12/2023).

Pasal 10 draf RUU DKJ menyebutkan, "Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memerhatikan usul atau pendapat

DPRD'. Bagi PKS, frasa yang melibatkan usul atau pendapat DPRD dalam penunjukan gubernur-wakil gubernur DKJ oleh presiden masih kurang demokratis.

Mardani menyebut PKS tetap ingin ada Pilgub Daerah Khusus Jakarta. Mardani mengungkit DKJ yang akan menjadi otonomi satu tingkat dengan hanya memiliki DPRD provinsi dan tidak ada pemilihan bupati/walikota.

"Kita sudah otonomi daerah satu tingkat. Cuma ada DPRD provinsi, tidak ada DPRD kabupaten/kota. Plus, tidak ada pemilihan bupati/wali kota. Mbok, ya ada pemilihan langsung di gubernur," ujar Mardani Ali Sera.

Hal senada diungkapkan, Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu. Masinton menegaskan tidak setuju draf RUU itu mengatur penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ dilakukan oleh presiden.

"Setelah Jakarta tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota, saya tidak setuju jika Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden," kata Masinton dalam cuitannya seperti dilihat, Selasa (5/12/2023).

Dihubungi terpisah, Masinton mengatakan Fraksi PDIP memang menyatakan setuju RUU itu dilanjutkannya setelah dirumuskan di Baleg DPR. Namun dia menekankan fraksinya memberikan catatan.

"Setuju dilakukan pembahasan dengan memberikan beberapa catatan, seperti mempertahankan kebudayaan Betawi, kesejarahan Jakarta sebagai bagian perengatan kebangsaan Indonesia menentang kolonialisme dan imperialisme. Gubernur dan wakil gubernur melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat," ujar Masinton.

8 Fraksi Setuju

Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disepakati menjadi usul inisiatif DPR RI. RUU ini dirancang karena ibu kota negara akan berpindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Disepakatinya RUU ini sebagai RUU inisiatif DPR diketok dalam rapat paripurna ke-10 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (5/12/2023).

Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus yang memimpin rapat paripurna meminta persetujuan kepada sidang dewan terhadap RUU DKJ yang semula usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. "Dengan demikian 9 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksi masing-masing. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-undang tentang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-undang usul DPR RI?" tanya Lodewijk.

"Setuju," jawab semua anggota Dewan yang hadir rapat paripurna.

Sebelum itu, Lodewijk

menyebutkan bahwa pihaknya menerima laporan dari Baleg terhadap penyusunan RUU usul inisiatif Baleg tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Dalam laporan itu disampaikan, sebanyak 8 fraksi setuju RUU untuk menjadi usul inisiatif DPR. "Yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP. Dan satu fraksi yaitu Fraksi PKS menolak," ucap Lodewijk.

Setelah itu, perwakilan Fraksi PKS, yaitu Hermanto menyatakan kembali pandangan fraksinya terkait RUU DKJ. Ia menegaskan bahwa Fraksi PKS menolak RUU itu karena sejumlah poin penting. Salah satunya penyusunan RUU DKJ dianggap tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna.

"Dalam penjelasan UU nomor 13 Tahun 2022 dinyatakan bahwa penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab, dengan memenuhi tiga syarat, yakni pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya, kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan ketiga hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas

pendapat yang diberikan," kata Hermanto dalam rapat paripurna.

Ia lantas menyimpulkan bahwa Jakarta masih layak menjadi Ibu Kota Negara. Di situ lah, Hermanto mewakili Fraksi PKS menyatakan menolak RUU DKJ. "Maka kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan memohon taufiq Allah SWT dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, menyatakan menolak Rancangan Undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta untuk ditetapkan menjadi Rancangan Undang-undang usulan DPR," tegas dia.

Terpisah, calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan turut merespons soal draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang di dalamnya menyebutkan, bahwa gubernur dan wakil gubernur Jakarta nantinya tidak lagi dipilih lewat Pilkada, melainkan ditunjuk presiden lewat usulan DPRD. Anies mengaku belum melihat draf yang dimaksud. Anies bakal mengecek draf itu terlebih dahulu.

"Saya belum lihat dokumennya, saya baca dulu," kata Anies di sela kampanye di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (5/12/2023). (wid,rls,ist,ant/dya)

METAMORFOSIS SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

MASA REFORMASI

- Tahun 1998 adalah tanda berakhirnya kekuasaan Orde Baru yang sentralistik. Setelah itu, semangat berbangsa dan bernegara berubah menjadi desentralistik atau pemerataan kekuasaan di daerah-daerah, tidak berpusat di Jakarta.
- Terbit Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah pada 7 Mei 1999, yang segera mengubah penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah. DPRD berada di luar pemerintah daerah, yang berfungsi sebagai badan legislatif pemerintah daerah untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
- Di masa ini, kepala daerah dipilih sepenuhnya oleh DPRD, tak lagi ada campur tangan Pemerintah Pusat.
- Lalu, terbit Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemilihan umum kepala daerah secara langsung.

MASA ORDE BARU

- Pemerintah pusat era Orde Baru mengukuhkan dominasi atas pemerintah daerah. Rezim Soeharto mengontrol penuh kepala daerah di seluruh tingkatan, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Kepala daerah diangkat oleh Presiden, yang mekanisme pemilihannya di DPRD juga dikontrol oleh Presiden.
- Maka, kepala daerah sesungguhnya bukan hasil pemilihan DPRD, karena patut atau tidak seseorang menjadi kepala daerah, bergantung sepenuhnya pada penilaian Presiden.

MASA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Pada tahun 1950 konstitusi berubah dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Sementara tahun 1950. Pada era ini, istilah dalam tingkatan pemerintah daerah diubah: di tingkat provinsi disebut daerah tingkat I yang dipimpin gubernur, di tingkat kota/kabupaten disebut daerah tingkat II yang di bupati atau wali kota, dan tingkat kecamatan disebut daerah tingkat III yang dipimpin camat.
- Kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri. DPRD hanya mengajukan nama, dan yang menentukan adalah Presiden atau Menteri Dalam Negeri sesuai tingkatan masing-masing.
- Posisi pemerintah pusat atas pemerintah daerah semakin kuat setelah terbit Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965, menyusul Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dalam undang-undang ini, kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri melalui calon-calon yang diajukan DPRD.

MASA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Di era ini, kepala daerah berfungsi sebagai pemimpin komite nasional daerah, sekaligus menjadi anggota dan ditetapkan sebagai ketua badan perwakilan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah.
- Dalam sistem ini, kepala daerah yang diangkat adalah kepala daerah pada masa sebelumnya. Alasannya karena situasi politik, keamanan, dan hukum ketatanegaraan kala itu sedang tidak stabil.
- Sistem ini disempurnakan pada tahun 1948. Istilah dalam tingkatan pemerintah daerah diperjelas, yakni provinsi, kabupaten atau kota besar, desa, dan nagari. Proses pemilihannya pun sedikit lebih demokratis, karena, misalnya, gubernur diangkat oleh Presiden setelah ada nama calon yang diajukan DPRD tingkat provinsi. Di bawahnya, DPRD tingkat kabupaten mengusulkan calon bupati, lalu diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. Kepala desa diangkat Gubernur setelah menerima nama calon yang diajukan DPR desa.

PEMKAB BLITAR RAIH 34 PRESTASI TINGKAT REGIONAL HINGGA NASIONAL DI 2023



Berbagai penghargaan tingkat regional hingga nasional sukses diraih Pemkab Blitar di tahun 2023 ini.

BLITAR - Di bawah duet kepemimpinan Bupati Blitar, Hj Rini Syarifah dan Wakil Bupati Blitar, H Rahmat Santoso, Pemkab Blitar sukses meraih 34 prestasi tingkat regional hingga nasional selama tahun 2023.

Prestasi itu diperoleh atas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhasil melakukan inovasi, pelayanan masyarakat diberbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, sosial dan lingkungan hidup.

Di bawah kepemimpinan Mak Rini dan Makdhe Rahmat --sapaan akra bupati dan wabup blitar--sebanyak 23 prestasi tingkat nasional dan 11 prestasi tingkat Jawa Timur diraih sampai awal Desember 2023 ini.

Untuk prestasi tingkat nasional diraih 23 penghargaan maupun reward dari 15 lembaga negara kementerian dan setingkatnya. Mulai dari Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial,

Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kominfo, Kementerian PAN RB, Kementerian PPA, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dikbud, Kementerian Ristek Dikti, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPS, BKN dan BPKRI.

Adapun di tingkat Jawa Timur, Pemkab Blitar meraih 11 prestasi, serta mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Diantaranya dari bidang informasi, Ketahanan Pangan, Kesehatan, Industri, pendidikan, peternakan dan keuangan desa.

Prestasi tingkat nasional pertama yang diraih pada Januari 2023 dan diterima oleh Plh Bupati Blitar H Rahmat Santoso dari Kementerian Perhubungan, yakni Penghargaan Apresiasi Pemerintah Kabupaten/Kota Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Atas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar

yang memperoleh akreditasi A, serta memenuhi standar pencegahan korupsi.

Salah satu prestasi tingkat nasional yang paling membanggakan bagi Kabupaten Blitar adalah Penghargaan Insentif Fiskal atas kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan 2023 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat 9 November 2023 lalu.

Sedangkan prestasi tingkat nasional yang terbaru diraih pada akhir November 2023 dari Kementerian Kesehatan, yaitu Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat (KKA) 2023 Swasti Saba Padapa.(data lengkap pada tabel)

Dalam berbagai kesempatan usai menerima penghargaan prestasi, Bupati Blitar Mak Rini selalu menyampaikan agar prestasi ini menjadi pemacu semangat, untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Terutama kepada para ASN di jajaran Pemkab Blitar, baik di tingkat OPD, kecamatan maupun kelurahan dan desa.

"Untuk mewujudkan kemajuan bersama dan kesejahteraan bersama, yang baldatun toyyibatun waruhhun ghofur di Kabupaten Blitar," tutur Bupati Blitar perempuan pertama ini.

Sementara itu mantan Wabup Blitar, Makdhe Rahmat yang sudah resmi mundur sejak 4 November 2023 lalu, karena maju dalam Pileg 2024 mendatang, mengaku bangga bisa memimpin Kabupaten Blitar. Walaupun hanya sebentar (sekitar 3 tahun), tapi bisa menjadi bagian dari sejarah di Kabupaten Blitar.

"Meskipun apa yang saya berikan untuk Kabupaten Blitar belum sempurna, tapi saya tetap menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak hingga bisa memimpin di Kabupaten Blitar sampai saya mengundurkan diri," pungkasnya. (arief sukaputra/* /dya)

- ▶ Anindhita Wistara Data atas Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS).
- ▶ TOP DIGITAL Implementation 2023 dari It WORKS.
- ▶ TOP Leader on Digital Implementation 2023 dari It WORKS.
- ▶ PPID Terbaik Kabupaten/Kota Kategori Menuju Informatif dari Komisi Informasi Jawa Timur.
- ▶ Penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabupaten Blitar atas keberhasilan dalam menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2023.
- ▶ Pengembangan Peternakan Unggas Dalam Mendukung Ketahanan Pangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- ▶ Penerimaan penghargaan kategori Dukungan Pembinaan Perhutanan Sosial di Kabupaten Blitar dan Juara 1 Kelompok Perhutanan Sosial dengan Booth Terbaik pada Jambore Perhutanan Sosial Jatim Tahun 2023.
- ▶ Penghargaan Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Swasti Saba dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dari Kementerian Kesehatan.
- ▶ Pemerintah Daerah dengan dukungan tinggi terhadap pembentukan komunitas pelajar di PMM dari KEMENRISTEK DIKTI Kepala BBPMP.
- ▶ Pemerintah Daerah dengan pencapaian tinggi untuk aksi nyata transisi PAUD SD dijenjang SD dari KEMENRISTEK DIKTI Kepala BBPMP.
- ▶ Pemerintah daerah dengan kategori capaian literasi tinggi pada jenjang SD dari KEMENRISTEK DIKTI Kepala BBPMP.
- ▶ Pemerintah daerah dengan pencapaian target aksi nyata transisi PAUD ke SD yang menyenangkan lebih awal di tingkat SD dari KEMENRISTEK DIKTI Kepala BBPMP.

- ▶ TOP 30 SILAKSMI (Sistem Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas) RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar dari Gubernur Jawa Timur.
- ▶ Dedikasi dan Dukungan Pelaksanaan Operasi Katarak di Kabupaten Blitar, dari Kementerian Sosial.
- ▶ Terbaik II Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional yang Cemerlang, Efektif, Responsif, Inovatif, dan Akurat (Pelita Ceria) dari Gubernur Jawa Timur.
- ▶ TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2023 untuk Inovasi WINGS dari Kementerian PANRB.
- ▶ Kinerja Insentif Fiskal kategori "Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2023 dari Kementerian Keuangan.
- ▶ Apresiasi Pembinaan Proklam tingkat Kabupaten dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- ▶ Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional Tahun 2023 untuk UPT SDN 1 Mangunan, UPT SMP negeri 1 Sanankulon, MTSN 8 Blitar, SMAN 1 Srengat, dan MAN 2 Wlingi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- ▶ Perpartisipasi aktif Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan Program Kampung iklim (Proklam) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- ▶ Pemerintah Kabupaten yang mendukung Pengembangan Industri Halal di Jawa Timur pada East Java Halal Industry Fest 2023 dari Gubernur Jawa Timur.
- ▶ Komitmen serta Kepedulian melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Guru Paud (Inisiatif Pemberian Kebijakan Insentif Bagi Guru Paud Non Formal) dari HIMPAUDI Provinsi Jawa Timur.

- ▶ Instansi Terbaik Pertama dalam Instansi Teraktif dalam pendaftaran PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) di Lingkup Publik Tingkat Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 dari Kementerian Kominfo.
- ▶ Nirwasita Tantra kategori Kabupaten Besar Terbaik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- ▶ Kabupaten Layak Anak 2023 Kategori Nindya oleh Kementerian PPA.
- ▶ BKN Award 2023 Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik dari BKN dan Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian dari BKN.
- ▶ Pemerintah Daerah Transformatif Tingkat Kabupaten/Kota Non 3T dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada Kabupaten Blitar sebagai Pemerintah Kabupaten/Kota dengan transaksi terbanyak dalam pemanfaatan Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-katalog lokal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- ▶ Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- ▶ Pencairan Dana Desa Tercepat-ke-3 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- ▶ Komitmen dan kerja keras dalam mendorong percepatan pembangunan desa di Kabupaten Blitar hingga mencapai status Berkembang, Maju, dan Mandiri dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
- ▶ Apresiasi Pemerintah Kabupaten/Kota Program Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi dengan Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dari Kementerian Perhubungan.
- ▶ Kepala Daerah yang Berkomitmen mengembangkan Peternakan Unggas Dalam Mendukung Ketahanan Pangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kasus Pneumonia Misterius Sudah Terdeteksi di RI, Menko PMK Duga Terkait Polusi Udara

JAKARTA- Kasus pneumonia misterius diduga dari bakteri mycoplasma yang 'mengemparkan' China sejak bulan lalu ternyata sudah terdeteksi Indonesia. Kasus pertama diketahui muncul di Jakarta.

Menko PMK Muhadjir Effendy menilai kemunculan kasus pneumonia misterius di Jakarta ada kaitannya dengan polusi udara. Sebab menurut data Kemenkes, secara umum kasus pneumonia meningkat di Jakarta sejak Juli 2023.

"Mengenai itu, kan, berkaitan dengan udara, ya. Ya, itu sebetulnya ada indikasi udara Jakarta yang polusinya semakin tinggi," kata Muhadjir saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/12/2023).

Di sisi lain, Muhadjir juga menyoroti musim penghujan yang hadir jelang akhir tahun. Ia berharap musim hujan menyebabkan polusi berkurang, penyakit pernapasan pun demikian. "Sekarang sudah memasuki musim hujan, mudah-mudahan bisa ikut membantu penurunan," ujar dia.

Sebelumnya Staf Teknis Komunikasi Kemenkes, Dr Tegala Salama mengakui penemuan kasus di Jakarta. "Sudah ada di Jakarta," kata Ngabila melalui pesan singkat, Selasa (5/12/2023).

Namun Ngabila belum mendetailkan jumlah kasus yang dimaksud. Termasuk anak usia berapa yang terserang. "Kami sedang himpun datanya dari RS-RS lain dan meningkatkan kewaspadaan serta

pelaporan," ujarnya.

Ia menegaskan, kasus pneumonia pada anak di Jakarta meningkat, khususnya pada Juli 2023. Untuk mendeteksi apakah itu pneumonia mycoplasma atau bukan, harus ada pemeriksaan PCR.

"Beberapa dokter terutama dokter anak melakukan pemeriksaan PCR untuk mengetahui spesifik kuman penyebab pneumonia untuk memberikan terapi yang spesifik dan mencegah resistensi antibiotik karena digunakan berlebihan," jelas Ngabila.

Sebab, meskipun pneumonia yang disebabkan oleh bakteri biasanya diobati dengan antibiotik yang dikenal sebagai makrolida, tapi ada ancaman lain. Yakni ketergantungan yang

berlebihan pada obat-obatan ini telah menyebabkan berkembangnya resistensi patogen.

"Pemeriksaan PCR ini bukan kewajiban karena dilakukan secara mandiri/berbayar. Dari pemeriksaan PCR ini dapat dilihat apa penyebab pneumonianya karena virus, atau bakteri, atau bakteri atypical seperti mycoplasma ini," kata Ngabila.

Akibat pneumonia misterius yang belakangan diketahui disebabkan oleh mycoplasma ini, jumlah anak yang dirawat di rumah sakit sejak Mei, khususnya di kota-kota utara seperti Beijing, melonjak. Mycoplasma pneumoniae adalah bakteri yang menginfeksi paru-paru. (wid,rls, ist/dya)